

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BUDIDAYA PISANG CAVENDISH DI KABUPATEN BONE



ROMI EKASAPUTRA

E041211024



**DEPARTEMEN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

2025

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BUDIDAYA PISANG CAVENDISH DI KABUPATEN
BONE**

ROMI EKASAPUTRA

E041211024



**DEPARTEMEN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

2025

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BUDIDAYA PISANG CAVENDISH DI KABUPATEN
BONE**

ROMI EKASAPUTRA

E041211024

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana

UNIVERSITAS HASANUDDIN

Program Studi Ilmu Politik

Pada

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2025**

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BUDIDAYA PISANG CAVENDISH DI
KABUPATEN BONE**

ROMI EKASAPUTRA
E041211024

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Sarjana
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan pada tanggal 26 Bulan Juni Tahun
2025

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

Mengesahkan,
Pembimbing Tugas Akhir



Dr. Sakinah Nadir, S.IP., M.Si
NIP. 197912182008122002

Mengetahui
Ketua Departemen Ilmu Politik



Dr. Sakinah Nadir, S.IP., M.Si
NIP. 197912182008122002

HALAMAN PENERIMAAN

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BUDIDAYA PISANG CAVENDISH DI
KABUPATEN BONE**

ROMI EKASAPUTRA
E041211024

Telah diperbaiki dan dinyatakan telah memenuhi syarat
oleh panitia ujian Skripsi pada

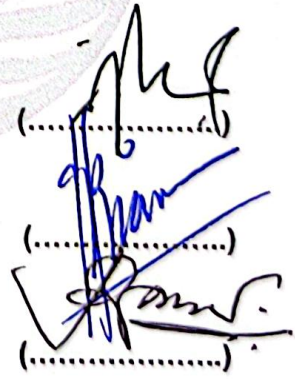
PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR

PANITIA UJIAN

Ketua : Dr. Sakinah Nadir, S.IP., M.Si

Anggota : Dr. Ariana Yunus, S.IP., M.Si

Anggota : Dr. Muh. Imran, S.IP., M.Si



(.....)

(.....)

(.....)

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI
DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA**

Dengan ini saya menyatakan bahwa, skripsi berjudul "**Implementasi Kebijakan Program Budidaya Pisang Cavendish di Kabupaten Bone**" adalah benar karya saya dengan arahan dari pembimbing Dr. Sakinah Nadir, S.IP., M.Si. sebagai Pembimbing Tugas Akhir. Karya ilmiah ini belum diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka skripsi ini. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini adalah karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut berdasarkan aturan yang berlaku.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta (hak ekonomis) dari karya tulis saya berupa skripsi ini kepada Universitas Hasanuddin.

Makassar, 26 Juni 2025

Yang Menyatakan,




Romi Ekasaputra
E041211024

UCAPAN TERIMAKASIH

Dengan mengucapkan syukur *Alhamdulillahirobbii alamiin*, sungguh sebuah perjuangan yang cukup panjang telah aku lalui untuk mendapatkan gelar sarjana ini. Rasa syukur dan bahagia yang kurasakan ini akan aku persembahkan kepada orang-orang yang ku sayangi dan berarti dalam hidupku:

1. Kepada sumber segala kasih dan karunia, sumber pengetahuan, sumber inspirasi, sumber kekuatan, sumber sukacita selama proses penulisan skripsi ini. Dialah Allah Swt, yang menyertai penulis dalam berbagai hal dan memberikan semua nya indah pada waktu-Nya;
2. Orang tua saya Bapak Udding dan Ibu Tini, dua orang yang sangat berjasa dalam hidup saya, dua orang yang selalu mengusahakan anak bungsu ini menempuh pendidikan setinggi-tingginya meskipun mereka berdua sendiri hanya bisa menempuh pendidikan sampai tahap dasar. Kepada bapak saya terima kasih atas setiap cucuran keringat dan kerja keras yang engkau tukarkan menjadi sebuah nafkah demi anakmu bisa sampai kepada tahap ini, demi anakmu dapat mengenyam pendidikan sampai ke tingkat ini, dan terima kasih telah menjadi contoh untuk menjadi seorang laki-laki yang bertanggung jawab penuh terhadap keluarga. Untuk ibu saya, terima kasih atas segala motivasi, pesan, doa, dan harapan yang selalu mendampingi setiap langkah dan ikhtiar anakmu untuk menjadi seseorang yang berpendidikan, terima kasih atas kasih sayang tanpa batas yang tak pernah lekang oleh waktu, atas kesabaran dan pengorbanan yang selalu mengiringi perjalanan hidup saya, terima kasih telah menjadi sumber kekuatan dan inspirasi, serta pelita yang tak pernah padam dalam setiap langkah yang saya tempuh. Terakhir, terima kasih atas segala hal yang kalian berikan yang tak terhitung jumlahnya.
3. Ibu Dr. Sakinah Nadir, S.IP., M.Si. selaku dosen pembimbing tugas akhir yang dengan sabar membimbing saya hingga titik ini, serta Prof. Dr. Phil. Sukri, M.Si. yang telah menjadi dosen pembimbing akademik sejak awal langkah saya di kampus ini. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Ibu Dr. Ariana Yunus, S.IP., M.Si. dan Bapak Dr. Muh. Imran, S.IP., M.Si. selaku dosen penguji yang telah memberikan arahan dan evaluasi yang membangun. Tidak lupa kepada seluruh dosen di Departemen Ilmu Politik, terima kasih atas ilmu, wawasan, kritik, saran, dan kesediaan meluangkan waktu di tengah padatnya kesibukan. Dengan penuh rasa haru dan syukur, saya hanya bisa berharap semoga segala jerih payah dan keikhlasan Bapak/Ibu dibalas dengan rezeki yang berlimpah, kesehatan yang tak putus, dan keberkahan di setiap langkah pengabdian.
4. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) atas hadirnya program KIP Kuliah yang telah membuka jalan bagi saya untuk menggapai pendidikan tinggi, dan terkhusus kepada Bapak Nadiem Makarim atas inisiasi Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka Batch 3 yang begitu luar biasa, program yang bukan hanya mempertemukan kami dengan keberagaman Indonesia, tetapi juga menyisahkan rindu yang tak terucapkan pada setiap perpisahan, sebuah pengalaman yang akan terus hidup

- dalam hati dan kenangan kami selamanya.
5. Pimpinan Universitas Hasanuddin dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memfasilitasi perjalanan saya dalam menempuh program sarjana, serta seluruh dosen Departemen Ilmu Politik yang telah menjadi cahaya ilmu di setiap langkah perkuliahan saya. Terima kasih pula kepada para informan penelitian yang telah meluangkan waktu dan pengetahuan
 6. Untuk saudara tanpa sedarah, berbeda jalan namun satu tujuan Circle Entitas 14. Kalian adalah rumah yang selalu ada dalam suka maupun duka, tempat di mana setiap tawa menjadi penawar lelah, setiap bahu menjadi sandaran yang tak pernah rapuh, dan setiap kata menjadi pengingat bahwa saya tidak sendiri. Terima kasih telah membersamai langkah ini dengan cinta, dukungan, dan semangat yang tak pernah padam, kalian adalah bagian terindah dari perjalanan ini yang akan selalu saya kenang dengan penuh rasa syukur dan air mata bahagia. Serta untuk A. Nur Amalia yang selalu memberikan dukungan dan mau direpotkan selama penelitian dan penyusunan skripsi ini.
 7. Kepada Kakak pertama saya Ernawati dan suami serta Kakak kedua saya Rosmiati dan suami yang terkasih dan tersayang yang telah memberikan semangat, motivasi, serta menjadi salah satu donatur penulis dalam menjalani masa perkuliahan, proses penulisan skripsi hingga saat ini.
 8. Bapak Firdaus dan Ibu Hj. Murni atas kasih sayang dan tempat tinggal yang begitu hangat selama saya menempuh pendidikan, bukan sekadar atap untuk berlindung, tetapi rumah yang penuh keikhlasan, doa, dan pelukan yang diam-diam menguatkan; kebaikan Bapak dan Ibu akan selalu saya kenang sebagai bagian dari perjalanan hidup yang tak akan pernah saya lupakan.
 9. Juga kepada wanita yang akan membersamai penulis nantinya, skripsi ini adalah bagian dari pertanggungjawaban penulis atas nama masa depan (kita).
 10. Terima kasih untuk diriku sendiri yang telah bertahan sejauh ini dengan semangat dan percaya diri, meski sering kali lelah, kecewa, dan diam-diam ingin menyerah. Untuk setiap malam penuh air mata dan hari-hari yang terasa begitu berat, terima kasih telah tetap melangkah. Orang lain gak akan bisa paham struggle dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian success stories. Tapi tetaplah berjuang untuk diri sendiri, walaupun gak ada yang tepuk tangan, karena kelak dirimu di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kamu perjuangkan hari ini. Tetap berjuang ya. Sekali melangkah, pantang menyerah, sekali tampil harus berhasil.

Penulis

Romi Ekasaputra

ABSTRAK

Romi Ekasaputra - E041211024. Implementasi Kebijakan Program Budidaya Pisang Cavendish di Kabupaten Bone. Di bawah bimbingan Sakinah Nadir sebagai Pembimbing Utama.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Program Budidaya Pisang Cavendish di Kabupaten Bone sebagai strategi peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal melalui sektor pertanian hortikultura. Program ini merupakan inisiatif Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang dituangkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2023 dan melibatkan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah daerah, pihak swasta (PT Cipta Agri Pratama), dan lembaga keuangan seperti OJK dan Bank Sulselbar. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teori implementasi kebijakan George C. Edward III, yang menitikberatkan pada empat variabel: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dokumentasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan pengalaman petani dan produktivitas sektor pertanian. Namun, implementasi kebijakan belum berjalan secara optimal karena masih menghadapi sejumlah kendala, termasuk keterbatasan penyuluh lapangan, akses pembiayaan, serta rendahnya pemahaman teknis budidaya di kalangan petani. Faktor pendukung keberhasilan meliputi komitmen pemerintah daerah, ketersediaan regulasi, serta peran aktif sektor swasta sebagai mitra offtaker. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan budidaya pisang Cavendish di Kabupaten Bone berpotensi menjadi model replikasi dalam pengembangan komoditas hortikultura lain di wilayah dengan kondisi geografis dan regulatif yang serupa.

***Kata Kunci:* Implementasi Kebijakan, Pisang Cavendish, George C. Edward III, Kesejahteraan Petani,**

ABSTRACT

Romi Ekasaputra - E041211024. Implementation of Cavendish Banana Cultivation Program Policy in Bone Regency. Under the guidance of Sakinah Nadir as the Main Supervisor.

This study aims to analyze the implementation of the Cavendish Banana Cultivation Program policy in Bone Regency as a strategy to improve local community welfare through the horticultural agriculture sector. This program is an initiative of the South Sulawesi Provincial Government which is stated in Governor Regulation Number 50 of 2023 and involves cross-sector collaboration between local governments, the private sector (PT Cipta Agri Pratama), and financial institutions such as OJK and Bank Sulselbar. The study used a descriptive qualitative approach with George C. Edward III's policy implementation theory, which focuses on four variables: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. Data collection techniques were carried out through in-depth interviews, direct observation, documentation, and literature studies. The results of the study showed that this program had a positive impact on improving farmer experience and agricultural sector productivity. However, policy implementation has not been running optimally because it still faces a number of obstacles, including limited field extension workers, access to financing, and low technical understanding of cultivation among farmers. Supporting factors for success include local government commitment, availability of regulations, and the active role of the private sector as an offtaker partner. This study concludes that the Cavendish banana cultivation policy in Bone Regency has the potential to be a replication model in the development of other horticultural commodities in areas with similar geographical and regulatory conditions.

Keywords: Policy Implementation, Cavendish Banana, George C. Edward III, Farmer Welfare,

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN PENGAJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PENERIMAAN	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
UCAPAN TERIMAKASIH	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACK	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Manfaat Penelitian.....	5
1.5. Tinjauan Pustaka.....	6
1.5.1. Penelitian Terdahulu.....	6
1.5.2. Konsep Kebijakan Publik.....	7
1.5.2.1. Kebijakan Publik.....	7
1.5.2.2. Implementasi Kebijakan Publik.....	9
1.5.3. Program Budidaya Pisang Cavendish.....	13
1.5.4. Kerangka Berpikir.....	13
1.5.5. Skema Penelitian.....	15
BAB II. METODE PENELITIAN	16
1.6. Lokasi Penelitian.....	16
1.7. Tipe dan Jenis Pendekatan.....	16
1.8. Sumber Data.....	17
1.8.1. Data Primer.....	17
1.8.2. Data Sekunder.....	17
1.9. Teknik Pengumpulan Data.....	17
1.9.1. Observasi.....	17
1.9.2. Wawancara.....	17
1.9.3. Dokumentasi.....	18
1.9.4. Studi Pustaka.....	19
1.10. Analisis Data.....	19
1.10.1. Reduksi Data.....	19
1.10.2. Penyajian Data.....	19
1.10.3. Penarikan Kesimpulan.....	19
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	20
3.1. Gambaran Umum.....	20
3.2. Profil Kebijakan Program Budidaya Pisang Cavendish.....	26
3.3. Implementasi Kebijakan Program Budidaya Pisang Cavendish Sebagai Upaya	

Peningkatan Perekonomian Masyarakat di Kabupaten Bone.....	28
3.4. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Program Budidaya Pisang Cavendish di Kabupaten Bone.....	36
3.5. Dampak Implementasi Kebijakan Program Budidaya Pisang Cavendish di Kabupaten Bone.....	41
BAB IV PENUTUP	45
4.1. Kesimpulan.....	45
4.2. Saran.....	45
DAFTAR PUSTAKA	47
LAMPIRAN DOKUMENTASI PENELITIAN.....	50
LAMPIRAN TRANSKIP WAWANCARA.....	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Bone tahun 2023 (persen).....	2
Gambar 2. Struktur PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Bone tahun 2021-2023 (persen).....	3
Gambar 3. PDRB Per Kapita Kabupaten Bone tahun 2019-2023 (juta rupiah).....	3
Gambar 4. Peta Kabupaten Bone.....	20
Gambar 5. Jumlah Usaha Pertanian Perorangan Menurut Kecamatan dan Subsektor di Kabupaten Bone.....	22
Gambar 6. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 50 Tahun 2023.....	26
Gambar 7. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bone 2012-2024.....	42

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Informan/narasumber.....	18
Tabel 2. Jumlah Wilayah Administrasi di Kabupaten Bone.....	21
Tabel 3. Jumlah Kecamatan Berdasarkan Letak Geografis di Kabupaten Bone.....	23
Tabel 4. Jumlah Kecamatan Menurut Letak Topografi di Kabupaten Bone.....	24
Tabel 5. Jumlah Produksi Pisang di Kabupaten Bone Tahun 2021-2024.....	43

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penelitian ini membahas bagaimana implementasi kebijakan program Budidaya Pisang Cavendish dengan berfokus untuk mengetahui dan menggambarkan Implementasi kebijakan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat serta untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi Implementasi kebijakan program budidaya pisang cavendish. Dengan mengetahui implementasi dan faktor pendukung serta penghambat tersebut, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan dan memperkuat perekonomian masyarakat. Melalui pendekatan kolaboratif antara pemerintah, petani, dan pihak swasta (PT Cipta Agri Pratama), sehingga nantinya program ini dapat menjadi model sukses bagi pengembangan pertanian di daerah lain. Oleh karena itu, memahami implementasi kebijakan terkait program budidaya pisang ini sangat penting untuk memastikan bahwa manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat.

Program Budidaya Pisang Cavendish merupakan langkah strategis yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan ketahanan pangan. Provinsi Sulawesi Selatan, menerapkan program ini berdasarkan inisiatif diprakarsai oleh Bahtiar Baharuddin saat menjabat sebagai Penjabat Gubernur, dengan harapan untuk mengurangi ketergantungan masyarakat pada beras dan menciptakan sumber ekonomi baru. Melihat potensi besar dari pisang Cavendish, yang permintaannya tinggi baik di pasar domestik maupun internasional, Bahtiar menyadari bahwa Indonesia hanya mampu memenuhi 35% dari total permintaan pisang. Oleh karena itu, pengembangan budidaya pisang ini diharapkan dapat meningkatkan produksi lokal dan memberikan alternatif pangan yang lebih beragam bagi masyarakat.

Sebagai langkah awal, program ini diluncurkan dengan penanaman perdana di Desa Batugading dan Desa Tellongeng di Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, pada November 2023. Diskusi antara berbagai pihak, termasuk petani dan perusahaan terkait, menghasilkan kesepakatan untuk memulai proyek ini. Dengan dukungan dari pemerintah dan lembaga keuangan, program Budidaya Pisang Cavendish menargetkan perluasan area tanam hingga 2.433 hektar pada tahun 2025, melibatkan ribuan petani dalam prosesnya. Melalui kolaborasi ini, diharapkan tidak hanya meningkatkan perekonomian masyarakat tetapi juga menjadikan Sulawesi Selatan sebagai sentral produksi pisang Cavendish nasional.

Sebagai bentuk dukungan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat maka disahkanlah regulasi terkait Program Budidaya Pisang Cavendish di Sulawesi Selatan yang ditetapkan melalui berbagai kebijakan yang melibatkan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang ada di Sulawesi Selatan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2023 tentang pengembangan budi daya tanaman pisang sebagai payung hukum untuk memastikan keberlanjutan program ini. Program ini diluncurkan pada 28 Oktober 2023 dan menjadi salah satu program unggulan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Sulawesi Selatan, dengan tujuan untuk meningkatkan sektor hortikultura dan kesejahteraan masyarakat melalui kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan petani (Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)

Sulawesi Selatan).

Program ini juga melibatkan kerjasama dengan berbagai mitra, termasuk perusahaan swasta yaitu PT Cipta Agri Pratama yang berfungsi sebagai offtaker hasil panen, sehingga memastikan bahwa hasil produksi dapat dipasarkan dengan baik. Dengan adanya regulasi yang jelas dan dukungan dari berbagai pihak, program budidaya pisang Cavendish di Sulawesi Selatan diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan petani yang juga bekerjasama dengan lembaga keuangan yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berperan penting dalam mengintegrasikan ekosistem dari hulu ke hilir, termasuk penyusunan kebijakan dan alokasi anggaran yang diperlukan untuk mendukung budidaya pisang ini. OJK juga melaksanakan edukasi kepada petani mengenai sistem kredit dan manajemen hasil tani melalui workshop dan diskusi kelompok terarah (Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulawesi Selatan). Selain itu, dukungan dari lembaga perbankan seperti Bank Sulselbar sangat krusial dalam menyediakan pembiayaan melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang memungkinkan petani untuk mengembangkan lahan budidaya mereka.

Di Sulawesi Selatan terdapat 24 kabupaten/kota, namun yang direncanakan secara spesifik sebagai sentral budidaya pisang Cavendish di Sulawesi Selatan adalah Kabupaten Bone yang memiliki kondisi tanah dan iklim yang sangat mendukung untuk pertumbuhan pisang Cavendish. Kabupaten Bone selain potensi yang besar juga mempunyai dukungan regulasi yang kuat, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Bone tentang Lahan Pertanian (PERDA) Nomor 9 Tahun 2022 yang mengatur tentang pengelolaan dan perlindungan lahan pertanian serta mendukung petani untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertaniannya. Selain itu dalam upaya memperkuat kapasitas penerapan standar pertanian, Balai Besar Penerapan Alat Pertanian Standar (BBSIP) Kabupaten Bone juga melibatkan penyuluh dan petani dalam penerapan teknologi pertanian yang memenuhi standar yang telah ditetapkan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa Budidaya Pisang Cavendish di Kabupaten Bone tidak hanya mengandalkan potensi alam, tetapi juga didukung oleh praktik pertanian yang baik dan berkelanjutan untuk meningkatkan perekonomian di Kabupaten Bone.

Gambar 1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Bone tahun 2024 (persen)



Sumber: BPS Kabupaten Bone 2025

Berdasarkan data Badan Pusat Statistika (BPS) Kabupaten Bone 2025, terlihat perekonomian Kabupaten Bone tahun 2024 dibanding tahun 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 5,55 persen. Pertumbuhan positif terjadi pada hampir semua lapangan usaha, kecuali lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah d, Limbah dan Daur Ulang yang mengalami pertumbuhan negatif (kontraksi) sebesar -0,53 persen. Adapun lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Jasa Lainnya sebesar 13,52 persen dan Jasa kesehatan dan Kegiatan Sosial Lainnya sebesar 9,17 persen. Sebanyak 6 lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif dan tumbuh lebih cepat pada tahun 2024 dibandingkan tahun 2023. Sedangkan 10 lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif namun melambat jika dibandingkan tahun sebelumnya.

Gambar 2. Struktur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Bone tahun 2022-2024 (persen)



Sumber: BPS Kabupaten Bone 2025

Sementara berdasarkan data Struktur PDRB Kabupaten Bone menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku pada tahun 2024 tidak menunjukkan perubahan berarti. Perekonomian Kabupaten Bone masih didominasi oleh Lapangan Usaha oleh Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 48,38 persen; Perdagangan Besar-Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 11,57 persen; Konstruksi sebesar 10,61 persen; dan Industri Pengolahan sebesar 7,16 persen. Peranan keempat lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Kabupaten Bone mencapai 77,72 persen.

Gambar 3. PDRB Per Kapita Kabupaten Bone tahun 2020-2024 (juta rupiah)



Sumber: BPS Kabupaten Bone 2024

Sehingga dapat disimpulkan bahwa salah satu indikator tingkat kesejahteraan penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Pada tahun 2024 PDRB per kapita tercatat sebesar 60,25 juta rupiah. Kenaikan angka PDRB ini disebabkan oleh meningkatnya salah satu produksi terutamanya produksi pisang di hampir seluruh lapangan usaha pertanian.

Implementasi kebijakan program pisang cavendish sebelumnya telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu, seperti Adopsi Budidaya Pisang Cavendish Pada Kemitraan CSV (*Creating Shared Value*) di Kabupaten Bondowoso (Clariza., 2024), Strategi Pengembangan BUMDes Pada Usaha Tani Pisang Cavendish Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Karangkemiri Kecamatan Pekuncen (Rizki & Esti, 2023), dan Program Menciptakan Manfaat Bersama Untuk Meningkatkan Pendapatan Petani Pisang di Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung (Abdur., 2021) adalah tiga contoh penelitian terkait. Penelitian pertama, yang dilakukan oleh Clariza, 2024 hanya berfokus pada tingkat adopsi inovasi teknik budidaya pisang cavendish di Kabupaten Bondowoso. Penelitian kedua, yang dilakukan oleh Rizki & Esti, 2023 hanya berfokus pada strategi pengembangan BUMDes pada usaha tani pisang cavendish untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Karangkemiri. Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Abdur., 2021 berfokus pada program CSV dengan melihat minat petani dan dampak program CSV pada komoditas pisang di Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Penelitian-penelitian tersebut tidak membahas secara spesifik implementasi kebijakan program budidaya pisang cavendish dalam memahami dinamika pengembangan pisang Cavendish, namun tidak ada satu pun yang secara khusus meneliti implementasi kebijakan secara menyeluruh sebagai proses yang melibatkan aktor, struktur, dan dinamika kebijakan publik, khususnya dalam konteks Kabupaten Bone yang menjadi lokasi strategis pengembangan program ini.

Program budidaya Pisang Cavendish di Kabupaten Bone tidak hanya berdampak pada peningkatan hasil pertanian, tetapi juga telah menciptakan fenomena baru di kalangan petani lokal. Sehingga, Penelitian mengenai implementasi kebijakan program Budidaya Pisang Cavendish di Kabupaten Bone sangat penting untuk dilakukan karena dapat memberikan wawasan mendalam tentang dampak kebijakan tersebut terhadap kesejahteraan petani lokal. Program ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan produksi pertanian, tetapi juga berperan strategis dalam meningkatkan variasi tanaman yang esensial untuk ketahanan pangan masyarakat. Dengan panen perdana yang dilaksanakan, banyak petani mulai menunjukkan ketertarikan untuk beralih dari tanaman tradisional, seperti tebu, ke Budidaya Pisang Cavendish. Hal ini didorong oleh potensi keuntungan yang lebih tinggi serta pemahaman yang semakin berkembang tentang pentingnya peningkatan variasi tanaman dalam meningkatkan ketahanan pangan. Selain itu, dukungan dari

pemerintah dan adanya program pelatihan bagi petani juga berkontribusi pada perubahan pola pikir ini, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal di Kabupaten Bone.

Namun belum ada penelitian yang secara spesifik mengkaji implementasi program ini berdasarkan teori Edward III dalam konteks Kabupaten Bone. Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan menggunakan teori implementasi kebijakan dari George Edward III (dalam Suharsono, 2005:90) yang memuat empat variabel utama: komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap pelaksana), dan struktur birokrasi. Teori ini belum banyak diaplikasikan secara spesifik dalam studi-studi sebelumnya yang membahas Budidaya Pisang Cavendish, terlebih dalam konteks implementasi kebijakan daerah dengan skema kolaboratif antara pemerintah, petani, sektor swasta, dan lembaga keuangan. Selain itu, belum ada kajian sebelumnya yang secara eksplisit menganalisis faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan Budidaya Pisang Cavendish di Kabupaten Bone, yang memiliki karakteristik geografis, sosial, dan regulatif yang unik, termasuk keberadaan regulasi daerah seperti PERDA No. 9 Tahun 2022 dan dukungan dari lembaga seperti PEMPROV, PEMDA, OJK, dan PT Cipta Agri Pratama. Penelitian ini juga mempertimbangkan dampak implementasi kebijakan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat berdasarkan data empiris. Dengan demikian, penelitian ini menghadirkan kontribusi akademis dan praktis melalui analisis implementasi kebijakan secara komprehensif dalam konteks program strategis daerah, yang belum banyak dikaji dalam literatur sebelumnya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan untuk penyempurnaan kebijakan serupa di daerah lain yang memiliki potensi pengembangan komoditas hortikultura secara berkelanjutan.

Berdasarkan hal ini, penulis menganggap perlu untuk melakukan penelitian dengan judul **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BUDIDAYA PISANG CAVENDISH DI KABUPATEN BONE”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana implementasi kebijakan program Budidaya Pisang Cavendish di Kabupaten Bone?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menggambarkan Implementasi kebijakan program Budidaya Pisang Cavendish sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bone.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi Implementasi kebijakan program Budidaya Pisang Cavendish di Kabupaten Bone.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat akademis

Hasil penelitian ini merangsang munculnya penelitian baru dalam bidang kebijakan publik sehingga studi ilmu politik dapat selalu menyesuaikan diri dengan perkembangan dan kegunaan ilmu pengetahuan, serta pelaksanaan sebuah kebijakan dalam lingkup Pemerintah Kabupaten.

2. Manfaat praktis

Hasil Penelitian ini secara praktis dapat menggambarkan implementasi kebijakan program Budidaya Pisang Cavendish di Kabupaten Bone dan penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya maupun sebagai informasi bagi pembaca yang sama serta dapat menambah wawasan terkait masalah dalam pengimplementasian sebuah kebijakan.

1.5. Tinjauan Pustaka

1.5.1. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu telah menguraikan bagaimana implementasi kebijakan program Budidaya Pisang Cavendish dalam arah kebijakan dan kerjasama antar individu pemangku kepentingan yang saling bergantung untuk mencapai tujuan masing-masing. Di bawah ini adalah beberapa hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Clariza Lailiya (2024) dengan jurnal penelitian yang berjudul "Adopsi Budidaya Pisang Cavendish Pada Kemitraan Csv (*Creating Shared Value*) di Kabupaten Bondowoso". Penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat adopsi petani terhadap Teknik Budidaya Pisang Cavendish pada seluruh tahapan adopsi berada dalam kategori yang tinggi. Faktor yang berhubungan positif dan signifikan dengan adopsi inovasi teknik Budidaya Pisang Cavendish adalah faktor dukungan penyuluhan, ketersediaan sarana dan prasarana budidaya, dan dukungan pasar, sedangkan pendidikan formal, luas lahan, dan status kepemilikan lahan tidak memiliki hubungan yang signifikan. Faktor umur memiliki hubungan negatif dan tidak signifikan.

Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan adopsi teknik budidaya sangat dipengaruhi oleh dukungan eksternal dan infrastruktur yang memadai, sementara faktor internal seperti pendidikan dan luas lahan mungkin tidak sekrusial yang diperkirakan dalam konteks ini, mengindikasikan perlunya pendekatan yang lebih holistik dalam program pengembangan pertanian di daerah tersebut.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Rizki Meiliana dan Esti Sardjanti (2023) dengan jurnal penelitian yang berjudul "Strategi Pengembangan BUMDes Pada Usaha Tani Pisang Cavendish Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Karangkemiri Kecamatan Pekuncen". Penelitian ini menunjukkan bahwa dari hasil analisis SWOT diperoleh alternatif strategi SO (kekuatan –peluang) agar usaha tani dapat berkembang lebih cepat dengan memanfaatkan peluang pasar, meningkatkan produktivitas dan kualitas pisang cavendish, serta memperluas daerah pemasaran dan menarik pelanggan baru. Berdasarkan hasil analisis, tingkat kesejahteraan

masyarakat keluarga pekerja BUMDes usaha tani pisang cavendish dan Anggota KUB sale pisang cavendish Desa Karang kemiri terdiri dari 2 kategori tingkat kesejahteraan yaitu tergolong dalam kategori tingkat kesejahteraan tinggi terdapat 9 keluarga (26%) dan kategori tingkat kesejahteraan sedang dengan jumlah 25 keluarga (74%).

Temuan ini menekankan pentingnya strategi pemasaran yang efektif dan peningkatan kualitas produk untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan gambaran tentang potensi pengembangan usaha tani pisang Cavendish, tetapi juga menunjukkan bahwa keberhasilan BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sangat bergantung pada strategi yang tepat dan dukungan terhadap kualitas produk serta pemasaran yang efektif.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Abdur Rofi (2021) dengan jurnal penelitian yang berjudul “Program Menciptakan Manfaat Bersama Untuk Meningkatkan Pendapatan Petani Pisang di Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung” Penelitian ini menunjukkan bahwa program CSV sudah dijalankan untuk komoditas pisang Cavendish di Tanggamus, Provinsi Lampung. Dalam program ini, petani mendapatkan bantuan bibit tanaman pisang, akses bantuan kredit untuk pembelian saprodi, dan kepastian penjualan hasil tanaman pisang dengan harga yang disepakati. Namun demikian, tidak semua petani berminat dalam program kemitraan dengan berbagai alasan, antara lain dikarenakan keterbatasan lahan, keterbatasan waktu yang dimiliki, dan petani tidak ingin terikat dalam perjanjian kerja. Dampak program CSV pada komoditas pisang terhadap pendapatan petani belum cukup besar karena pisang bukan komoditas utama sumber penghidupan petani. Program CSV dapat menjadi alternatif program CSR, namun keberhasilan program ini juga perlu mempertimbangkan profil dan juga sumber penghidupan petani untuk memastikan minat dan keterlibatan petani dapat lebih optimal.

Penelitian ini menegaskan bahwa meskipun program CSV dapat berfungsi sebagai alternatif untuk *Corporate Social Responsibility* (CSR), keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada pemahaman profil petani dan sumber penghidupan mereka. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa minat dan keterlibatan petani dapat dioptimalkan agar program ini lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan mereka.

1.5.2. Konsep Kebijakan Publik

1.5.2.1. Kebijakan Publik

Istilah "kebijakan" memiliki banyak definisi atau arti Menurut Anderson kebijakan adalah suatu Tindakan yang yang mempunyai tujuan yang dilakukan seseorang pelaku atau sejumlah pelaku untuk memecahkan suatu masalah. kebijakan sebagai “seperangkat kegiatan dengan tujuan tertentu yang diikuti dan dilakukan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor dalam rangka memecahkan suatu masalah tertentu”. Konsep ini menunjukkan bahwa suatu kebijakan dapat berasal dari individu atau sekelompok individu dan terdiri dari sekumpulan tindakan dengan tujuan tertentu. Terdapat banyak definisi kebijakan publik.

sedangkan menurut Woll, kebijakan publik adalah sejumlah aktivitas pemerintah untuk menyelesaikan masalah di masyarakat. Menurut Woll, dalam pelaksanaan kebijakan publik terdapat tiga hal yang berpengaruh sebagai implikasi dari Tindakan pemerintah. Pertama, kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk kehidupan masyarakat. Kedua, adanya output dalam bentuk program masyarakat. Ketiga, adanya dampak kebijakan yang merupakan efek pilihan kebijakan yang mempengaruhi kebijakan masyarakat.

Pemahaman ini berimplikasi, seperti fakta bahwa kebijakan selalu memiliki tujuan tertentu atau tindakan yang berorientasi pada tujuan, bahwa kebijakan mengandung tindakan atau pola tindakan oleh pejabat pemerintah, bahwa kebijakan adalah apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah bahwa kebijakan dapat menjadi positif dalam arti bahwa mereka adalah beberapa bentuk tindakan pemerintah mengenai masalah tertentu atau negatif dalam arti bahwa mereka adalah keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu dan bahwa kebijakan adalah apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah (otoritatif).

Dengan cara ini kebijakan selalu dikaitkan dengan apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Terlepas dari kenyataan bahwa itu adalah alat keberadaan Kebijakan Publik diperlukan dan sangat penting karena kehadirannya mempengaruhi tercapai atau tidaknya suatu tujuan meskipun masih banyak prasyarat atau langkah lain yang harus diselesaikan sebelum mencapai tujuan yang dimaksud. Penting karena meskipun kebijakan di atas kertas telah dibuat melalui proses yang baik dan berisi informasi berkualitas tinggi kebijakan tersebut tidak dapat secara otomatis diadopsi dan kemudian memberikan apa yang dimaksudkan oleh penulisnya. Ini juga penting karena suatu kebijakan dapat dan sering terjadi dipandang seolah-olah lebih penting atau sejajar dengan tujuan yang ingin dicapai meskipun faktanya itu hanyalah alat.

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu beberapa ahli politik yang menaruh minat harus mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik ke dalam beberapa tahap.

Adapun tahap-tahap kebijakan publik menurut Budi Winarmo yaitu:

a. Tahap penyusunan agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini suatu masalah mungkin tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu di tunda untuk waktu yang lama.

b. Tahap Implementasi Kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit jika program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, keputusan

program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumberdaya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (*implementors*) namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksanaan.

c. Tahap Evaluasi Kebijakan

Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan. Dalam hal ini, memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu ditentukanlah ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan.

Kebijakan publik pada dasarnya kebijakan yang selalu dikaitkan dengan apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Yang memuat program dan kegiatan yang dijalankan. Kebijakan publik mencakup hukum, peraturan perundang-undangan, keputusan dan pelaksanaan yang dibuat oleh Lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif, birokrasi pemerintahan, aparat penegak hukum dan badan-badan pembuat keputusan publik. Kebijakan publik dalam penelitian ini adalah Kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2023 tentang pengembangan budi daya tanaman pisang sebagai payung hukum untuk memastikan keberlanjutan program ini. Kebijakan ini di hadirkan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui inisiatif yang digagas oleh Bahtiar Baharuddin saat menjabat sebagai Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan yang kemudian di terapkan oleh beberapa kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan terutamanya Kabupaten Bone yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan dan menciptakan sumber ekonomi baru bagi masyarakat terutama yang berprofesi sebagai petani.

1.5.2.2. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi adalah “suatu proses dari politik ke administrasi untuk mengubah kebijakan menjadi tindakan kebijakan”. Dalam rangka menyempurnakan suatu program, pengembangan kebijakan.” Sedangkan menurut Rohaeni & Saryono, (2018) mengemukakan gagasan yang sama, menyatakan bahwa istilah “implementasi” secara umum mengacu pada “implementasi atau penerapan.” Istilah “implementasi” biasanya merujuk pada suatu proses. yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Menurut Aneta, (2018) ada tiga elemen penting dalam proses implementasi yaitu adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan, kelompok sasaran, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan bertekad untuk memperoleh manfaat dari program, perubahan

atau perbaikan dan unsur pelaksana. Pelaksanaan dan pengawasan proses pelaksanaan akan ditangani oleh suatu organisasi atau seseorang. Hal ini dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah suatu kegiatan dalam melaksanakan program-program yang telah dirancang untuk memenuhi tujuan organisasi berdasarkan definisi-definisi di atas.

Keberhasilan implementasi yang dilakukan pemerintah ditentukan oleh beberapa faktor dan masing-masing faktor atau variabel saling berhubungan antara satu sama lain adapun teori implementasi kebijakan yang menjadi dasar bagi peneliti dalam menganalisis yaitu melalui teori implementasi kebijakan dari George Edward III (dalam Suharsono, 2005:90), Menurut George Edward III terdapat empat faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan sebuah implementasi kebijakan yaitu faktor komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi dan disposisi. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan yaitu:

1. Komunikasi (*Communication*).

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Sementara itu, komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy makers*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementors*). Informasi perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar pelaku kebijakan dapat memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran (*target group*) kebijakan, sehingga pelaku kebijakan dapat mempersiapkan hal-hal apa saja yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan, agar proses implementasi kebijakan bisa berjalan dengan efektif serta sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri.

2. Sumber Daya (*Resources*)

Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan. Edward III mengemukakan bahwa bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Sumber daya di sini berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya ini mencakup sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi dan kewenangan.

3. Disposisi (*Disposition*)

Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan disebut Disposisi. Disposisi berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Adapun karakter penting yang harus ada dalam diri pelaksana kebijakan yaitu kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam suatu program yang telah dijalankan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan akan membuat mereka selalu

antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

4. Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*).

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat standart operation procedur (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan sesuai dengan tujuan dan sasaran kebijakan. Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terbagi-bagi akan cenderung melemahkan pengawasan sehingga membuat prosedur birokrasi menjadi rumit yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

Adapun indikator Implementasi Kebijakan menurut Edward III berikut uraian nya:

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Berikut adanya tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan komunikasi. Edward III Mengemukakan tiga variable tersebut diantaranya:

- a. Transmisi, Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (miskomunikasi), hal tersebut disebabkan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi, sehingga apa yang diharapkan terdistorsi ditengah jalan.
- b. Kejelasan, Komunikasi yang dilakukan implementor harus jelas sehingga pelaksana tidak bingung untuk menjalankan suatu perintah.
- c. Konsistensi, pada saat mengeluarkan aturan yang akan diterapkan maka harus konsisten jelas dan tepat sehingga dengan ini mempercepat pengimplementasian, jika perintah yang diberikan selalu berubah-ubah maka menimbulkan masalah bagi pelaksana.

2. Sumber Daya

Variabel atau faktor ketiga adalah Sumber daya. Edward III dalam Agustino (2012:151) Mengemukakan indikator sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu:

- a. Staf, sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Kegagalan sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai ataupun tidak kompeten dibidangnya.
- b. Informasi, dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk, yaitu pertama informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Dan kedua mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang

telah ditetapkan.

- c. Wewenang, bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan legitimasi atau otoritas bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik.
- d. Fasilitas, fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya. Tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

3. Disposisi

Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan disebut Disposisi. Disposisi berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Adapun karakter penting yang harus ada dalam diri pelaksana kebijakan yaitu kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam suatu program yang telah dijalankan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

4. Struktur Birokrasi

Menurut Edward III (Agustino, 2016 : 141) yang dapat mendorong kinerja struktur birokrasi atau organisasi ke arah yang lebih baik adalah Membuat standar operating procedures (SOP) yang lebih fleksibel, SOP adalah suatu prosedur atau aktivitas terencana rutin yang memungkinkan para pegawai (atau pelaksana kebijakan seperti aparatur, administratur, atau birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada setiap harinya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan (atau standar minimum yang dibutuhkan warga).

Dari pandangan diatas dapat dikatakan bahwa suatu proses implementasi kebijakan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan suatu program yang telah ditetapkan, serta menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran melainkan pula menyangkut komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi segala pihak yang terlibat, sekalipun dalam hal ini factor-faktor pendukung dan penghambat yang diharapkan ataupun yang tidak diharapkan dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan terdiri dari tujuan atau sasaran kebijakan, aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan dari hasil kegiatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (output), yaitu: tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih.

1.5.3. Program Budidaya Pisang Cavendish

Mengutip dari Website Pemerintah Sulawesi Selatan, Pisang Cavendish merupakan varietas pisang yang memiliki permintaan tinggi di pasar domestik dan internasional. Dengan potensi pasar yang besar, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan meluncurkan program Budidaya Pisang Cavendish pada 28 Oktober 2023 melalui inisiatif yang digagas oleh Bahtiar Baharuddin saat menjabat sebagai Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan dan menciptakan sumber ekonomi baru bagi masyarakat terutama yang berprofesi sebagai petani.

Hingga saat ini, program ini telah tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2023 tentang pengembangan budi daya tanaman pisang sebagai payung hukum untuk memastikan keberlanjutan program ini yang kemudian di terapkan oleh beberapa kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan terutamanya Kabupaten Bone. Kabupaten Bone dengan banyaknya potensi yang dimiliki telah direncanakan secara spesifik sebagai sentral Budidaya Pisang Cavendish, yang ditandai dengan penanaman perdana dan panen perdana di daerah tersebut.

Dalam upaya ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah membangun Sentra Pembibitan Pisang Cavendish di Dusun Waru, Desa Batu Gading, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone yang memiliki kapasitas untuk menampung hingga 40.000 bibit pisang. Lokasi ini dipilih karena kondisi tanah dan iklim yang sangat mendukung untuk pertumbuhan pisang Cavendish, serta adanya dukungan regulasi yang kuat. Regulasi tersebut termasuk Peraturan Daerah Kabupaten Bone tentang Lahan Pertanian (PERDA) Nomor 9 Tahun 2022, yang mengatur pengelolaan dan perlindungan lahan pertanian serta mendukung petani dalam meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan jaminan hukum bagi petani dan mendorong mereka untuk berinvestasi dalam budidaya pisang cavendish.

1.5.4. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan inti dari sebuah kegiatan penelitian yang berisi tentang dasar-dasar teoritis mengenai masalah-masalah yang akan diteliti. Dalam ilmu pengetahuan empiris, teori yang digunakan kerangka berpikir mengacu pada kaitan yang logis mengenai perangkat profesi yang memastikan adanya hubungan antara variabel-variabel dengan maksud untuk menjelaskan hal tersebut.

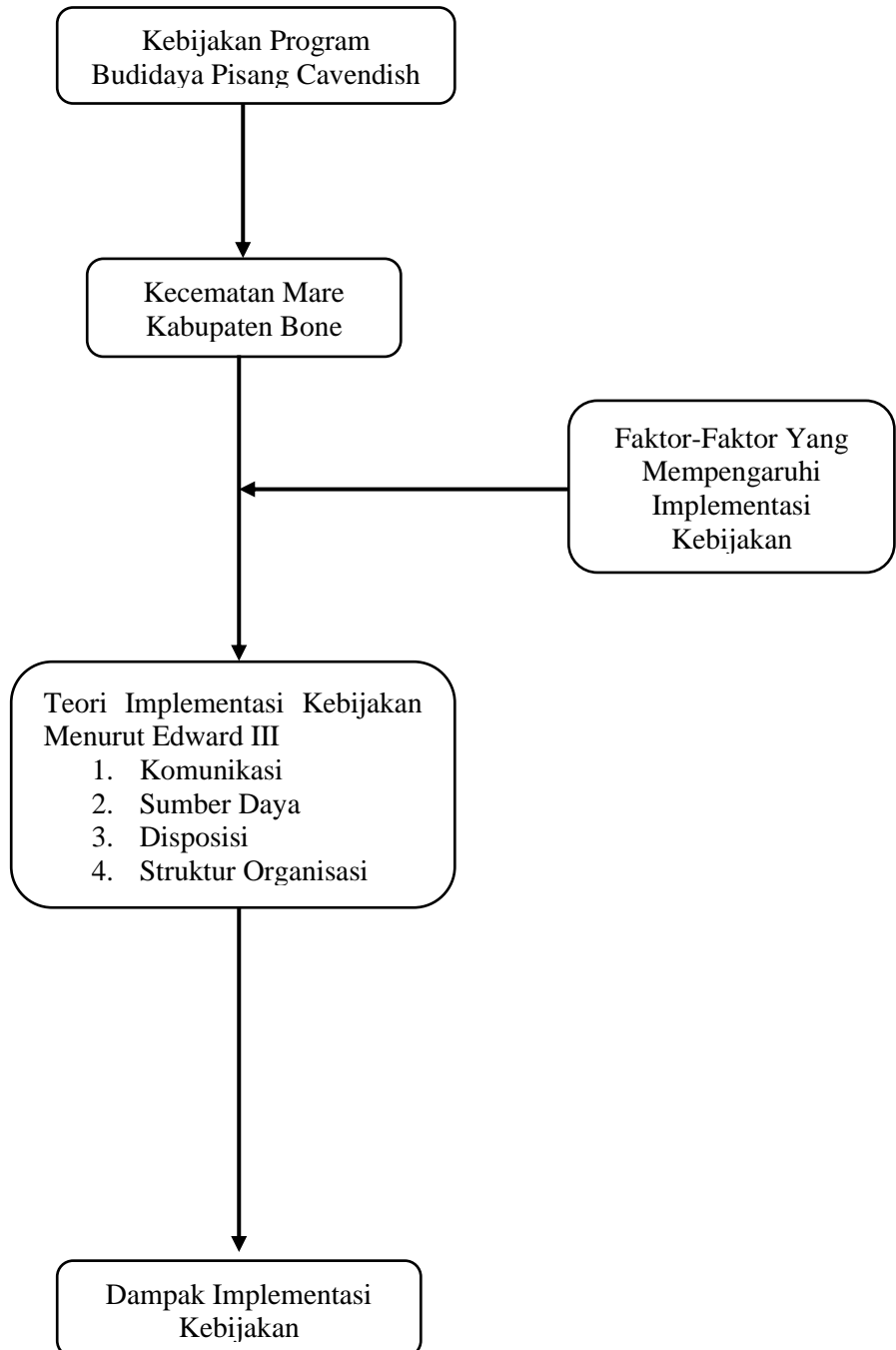
Syarat utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat saat ini adalah penerapan kebijakan pemerintah yang efektif. Kebijakan ini mendorong inovasi dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan pemerintahan, termasuk bagi Pemerintah Provinsi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat agar semua aktivitas di berbagai sektor dapat berjalan dengan baik. Sejak Bahtiar Baharuddin menjabat sebagai Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, dia menyadari potensi besar dari pisang Cavendish, yang memiliki permintaan tinggi baik di pasar domestik maupun internasional, sementara Indonesia hanya dapat memenuhi 35% dari total permintaan tersebut. Oleh karena itu, untuk mendukung kesejahteraan petani, telah

disahkan regulasi mengenai Program Budidaya Pisang Cavendish di Sulawesi Selatan melalui berbagai kebijakan yang melibatkan pemerintah provinsi serta kabupaten/kota setempat. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan akhirnya mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2023 tentang pengembangan budidaya tanaman pisang sebagai landasan hukum untuk memastikan keberlanjutan program ini. Program ini diluncurkan pada 28 Oktober 2023 dan menjadi salah satu program unggulan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Sulawesi Selatan.

Di Sulawesi Selatan terdapat 24 kabupaten/kota, namun Kabupaten Bone tepatnya di Kecamatan Mare direncanakan secara khusus sebagai pusat budidaya pisang Cavendish karena kondisi tanah dan iklimnya yang sangat mendukung pertumbuhannya. Selain memiliki potensi besar, Kabupaten Bone juga didukung oleh regulasi yang kuat, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Bone tentang Lahan Pertanian (PERDA) Nomor 9 Tahun 2022 yang mengatur pengelolaan dan perlindungan lahan pertanian serta mendukung petani dalam meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian mereka.

Sesuai dengan kebijakan publik yang ditetapkan oleh para pihak (*stakeholder*), khususnya pemerintah, yang diarahkan untuk memenuhi keinginan dan kepentingan masyarakat. Kebijakan adalah seperangkat rencana program, kegiatan, tindakan, hasil akhir, dan perilaku yang digunakan untuk memecahkan masalah. Kebijakan adalah seperangkat tindakan atau kelambanan yang dilakukan oleh aktor (pihak). Untuk menemukan bagaimana Implementasi kebijakan program pisang cavendish di Kabupaten. Peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan dari George Edward III (dalam Suharsono, 2005:90), Menurut George Edward III terdapat empat faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan sebuah implementasi kebijakan yaitu faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi yang nantinya akan mengetahui faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan.

1.5.5. Skema Penelitian



BAB II METODE PENELITIAN

2.1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini akan dilaksanakan di Kabupaten Bone dengan mengambil sampel atau data di Kantor Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Daerah Kabupaten Bone, Dinas Pertanian Kabupaten Bone, PT. Cipta Agri Pratama, Kantor Kecamatan Mare Kab. Bone, dan Petani di Kabupaten Bone.

Lokasi penelitian ini dipilih sebagai lokasi penelitian karena telah direncanakan secara spesifik sebagai sentral Budidaya Pisang Cavendish di Sulawesi Selatan, yang ditandai dengan penanaman perdana dan panen perdana di Kabupaten ini. Selain itu, Kabupaten Bone dipilih karena kondisi tanah dan iklim yang sangat mendukung untuk pertumbuhan pisang Cavendish, serta adanya dukungan regulasi yang kuat, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Bone tentang Lahan Pertanian (PERDA) Nomor 9 Tahun 2022, yang mengatur pengelolaan dan perlindungan lahan pertanian serta mendukung petani dalam meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan jaminan hukum bagi petani dan mendorong mereka untuk berinvestasi dalam budidaya pisang cavendish. Oleh karena itu maka lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bone dengan fokus penelitian untuk mengetahui dan menggambarkan Implementasi kebijakan dengan menganalisa peran pemerintah sebagai upaya peningkatan kesejahteraan petani lokal serta untuk mengetahui dampak dari penerapan program budidaya pisang cavendish.

2.2. Tipe dan Jenis Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut (Sugiarto, 2018) mengungkapkan bahwa penelitian kualitatif dilakukan karena peneliti ingin mengeksplor fenomena-fenomena yang tidak dapat dikuantifikasikan yang bersifat deskriptif seperti proses suatu langkah kerja, formula suatu resep, pengertian-pengertian tentang suatu konsep yang beragam, karakteristik suatu barang dan jasa, gambar-gambar, gaya-gaya, tata cara suatu budaya, model fisik suatu artifak dan lain sebagainya,

Peneliti menggunakan tipe penelitian deskriptif analisis yaitu penelitian diarahkan untuk memberikan gambaran mengenai masalah yang diteliti dan bagaimana teori yang di gunakan agar fokus mendapatkan fakta yang ada di lapangan mengapa Pemerintah mengeluarkan kebijakan tersebut. maksud dari penelitian ini ingin mendeskripsikan fakta-fakta yang terjadi dalam kebijakan serta kebijakan Pemerintah terhadap Peningkatan kesejahteraan petani lokal di Kabupaten Bone. Penelitian deskriptif analisis tidak memberikan perlakuan, manipulasi atau perubahan pada variabel- variabel yang diteliti, melainkan menggambarkan suatu kondisi yang apa adanya. Satu-satunya perlakuan yang diberikan hanyalah penelitian itu sendiri yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan keterangan dari beberapa ahli di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian deskriptif kualitatif yaitu rangkaian kegiatan untuk memperoleh data yang bersifat apa adanya tanpa ada dalam kondisi tertentu yang hasilnya lebih menekankan makna. Di sini peneliti menggunakan

metode penelitian deskriptif kualitatif karena penelitian ini mengeksplor fenomena mengenai implementasi kebijakan program budidaya pisang cavendish di Kabupaten Bone.

2.3. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data berfungsi untuk menyusun suatu pendapat, keterangan yang benar, dan keterangan atau bahan yang dipakai untuk penelitian. Berikut adalah sumber data dalam penelitian ini, yaitu:

2.3.1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung melalui studi lapangan dengan menggunakan teknik wawancara. Dalam prakteknya, peneliti mengumpulkan data melalui komunikasi langsung dengan para informan. Informan yang dimaksud disini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bone, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Pertanian Kabupaten Bone, Pemerintah Kecamatan Mare, PT. Cipta Agri Pratama, Kelompok Tani, dan Petani di Kabupaten Bone yang di anggap mampu memberikan informasi mengenai program budidaya pisang cavendish. Data primer ini berfungsi sebagai rujukan utama dalam penelitian ini yang di mana data ini di ambil langsung dari informan yang di anggap memenuhi kriteria untuk di jadikan informan.

2.3.2. Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, jurnal, dokumen pemerintah, artikel, yang diperoleh melalui media *online* maupun *offline* tentang impementasi kebijakan yang menguraikan tentang implementasi kebijakan.

2.4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat, relevan, dan dapat di pertanggungjawabkan maka penulis menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data karena masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu:

2.4.1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan indra sehingga tidak hanya dengan pengamatan menggunakan mata, mendengarkan, mencium, mengecap dan meraba termaksud bentuk observasi.

Observasi dilakukan di Kabupaten Bone, dimana peneliti mengamati tentang Implementasi Kebijakan Program Pisang Cavendish. Jenis observasi yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data di lapangan adalah observasi tidak terstruktur, yaitu peneliti melakukan pengamatan secara langsung dan berkembang sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan serta observasi tersebut dilaksanakan secara kondisional dengan tidak terlibat langsung.

2.4.2. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari

informan yang lebih mendalam. Dalam penelitian ini yang diwawancarai yaitu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk mendapatkan informasi mengenai kebijakan program budidaya pisang cavendish, Pemerintah Kabupaten Bone untuk mendapatkan informasi mengenai gambaran program budidaya pisang cavendish, Dinas Pertanian Kabupaten Bone untuk mendapatkan informasi mengenai penerapan program budidaya pisang cavendish, PT Cipta Agri Pratama untuk mendapatkan informasi mengenai penerapan program budidaya pisang cavendish, Pemerintah Kec. Mare Kab. Bone untuk mendapatkan informasi mengenai penerapan program budidaya pisang cavendish, Kelompok Tani untuk mendapatkan informasi mengenai penerapan program budidaya pisang cavendish, dan Petani untuk mendapatkan informasi mengenai penerapan program budidaya pisang cavendish. Adapun tujuan dari wawancara ini adalah untuk mendapatkan informasi mengenai Program Budidaya Pisang Cavendish sehingga di perolehlah data untuk nantinya dapat menggambarkan dan menganalisa bagaimana bentuk Implementasi kebijakan program budidaya pisang cavendish dalam meningkatkan kesejahteraan petani lokal di Kabupaten Bone.

Adapun informan atau narasumber yang akan di wawancara sebagai berikut:

Table 1. Informan/narasumber

No.	Nama	Jabatan
1.	Ardian Arabe, SP., M.Si	Kepala Bidang Hortikultura Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Sulawesi Selatan
2.	H. Ilham, SE., M.Si	Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kab. Bone
3.	Ernawati Syaefoel, SE., M.Si	Kepala Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kab. Bone
4.	Nurdin, SP., M.Si	Plt. Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura & Perkebunan Kabupaten Bone
5.	Endi Edisapara	Kepala Seksi Pembangunan dan Kerja Sama Masyarakat Kecamatan Mare
5.	Yoga Pratama	Projet Manager PT. Cipta Agri Pratama
6.	Abdul Aziz AB	Ketua Kelompok Tani Kec Mare
7.	Muhammad Nur	Petani

2.4.3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah suatu cara untuk memperoleh data dengan melakukan pencatatan sumber-sumber data yang ada pada lokasi penelitian yang berhubungan dengan fokus penelitian. Data ini merupakan data sekunder

dan data-data pada umumnya yang sudah ada. Adapun dokumen dalam penelitian ini adalah laporan-laporan, arsip-arsip, atau dokumen yang berkaitan dengan implementasi kebijakan program budidaya pisang cavendish.

2.4.4. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan suatu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian dengan mengumpulkan data- data dan sumber-sumber penelitian melalui buku, jurnal, majalah, surat kabar, artikel, dokumen pemerintah dan lain-lain. Studi pustaka digunakan dengan mengumpulkan data-data yang ada kemudian memahami dari setiap kesimpulan dan mengambil sumber-sumber data tersebut untuk dijadikan literatur dan referensi dalam memahami dan menganalisa penelitian. Adapun yang di maksud studi kepustakaan tersebut mengenai implementasi kebijakan

2.5. Analisis Data

Data yang telah diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif, analisis kualitatif dapat memberikan rincian yang lebih kompleks tentang fenomena yang sulit diungkapkan oleh metode kuantitatif. Analisis data adalah proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Analisa data dalam penelitian kualitatif dilakukan mulai sejak awal sampai sepanjang proses penelitian berlangsung. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara bersamaan dengan proses pengumpulan data. proses analisis yang dilakukan merupakan suatu proses yang cukup panjang dan melibatkan beberapa komponen, yaitu:

2.5.1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses analisis data yang dilakukan untuk mencari, menggolongkan, mengarahkan hasil-hasil penelitian dengan memfokuskan pada hal-hal yang dianggap penting oleh peneliti. Dengan kata lain reduksi data bertujuan untuk mempermudah pemahaman terhadap data yang telah terkumpul. Reduksi data berlangsung terusmenerus selama proyek yang berorientasi penelitian kualitatif berlangsung.

2.5.2. Penyajian Data

Informasi yang tersusun akan disajikan dan memberikan gambaran penelitian yang menyeluruh. Penyajian data yang disusun secara singkat, jelas, terperinci dan menyeluruh akan memudahkan dalam memahami gambaran terhadap aspek yang diteliti baik secara keseluruhan maupun secara sebagian, penyajian yang selanjutnya disajikan dalam bentukuraian atau laporan sesuai dengan hasil penelitian yang diperoleh.

2.5.3. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan merupakan upaya untuk mencari arti, makna, dan penjelasan yang dilakukan terhadap data yang telah dianalisis dengan mencari hal-hal penting. Kesimpulan disusun dalam bentuk pernyataan singkat dan mudah dipahami dengan mengacu kepada tujuan penelitian. Dengan demikian secara umum proses pengolahan data dimulai dengan pencatatan data lapangan lalu ditulis kembali dalam bentuk unifikasi dan kategorisasi data. Setelah data dirangkum, direduksi dan disesuaikan dengan fokus Masalah penelitian.